

PROFIL SOSIAL EKONOMI TEKNIS DAN KELEMBAGAAN



NYOTO SUWIGNYO.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

**Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia**





PROFIL SOSIAL EKONOMI TEKNIS DAN KELEMBAGAAN

PENGERTIA N

Gambaran informasi atau data mengenai keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan pada suatu daerah irigasi yang dibutuhkan oleh Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) untuk perencanaan program pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/IP3A , Poktan/Gapoktan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi-pertanian partisipatif

MANFAAT

1. Kegunaan bagi masyarakat petani (P3A/GP3A/IP3A dan Poktan/Gapoktan KWT) sebagai dokumen perencanaan pengelolaan irigasi pertanian secara berkelanjutan

1. Kegunaan bagi Komisi Irigasi sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam ; koordinasi perencanaan pengelolaan irigasi-pertanian ; pola dan rencana tata tanam ; rencana tahunan pembagian dan pemberian air ; rekomendasi prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi-pertanian (DPI), dll.

1. Kegunaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan irigasi-pertanian sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RP2I

2. Kegunaan bagi pemangku kepentingan lainnya terkait dengan irigasi-pertanian sekurang-kurangnya adalah sebagai dasar pertimbangan dalam ; Memberikan fasilitas bantuan sesuai kebutuhan kelembagaan petani ; kerjasama berdasarkan kesetaraan dan kemitraan

TUJUAN

1. Meningkatkan pemahaman Kelembagaan Pengelola Irigasi dan pengguna lainnya terhadap pelaksanaan kegiatan PSETK dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan PSETK.

2. Meningkatkan kemampuan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan pengguna lainnya dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil kegiatan PSETK.

3. Meningkatkan kemampuan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan pengguna lainnya dalam merumuskan program kerja pemberdayaan kelembagaan irigasi.



LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN PSETK

UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		sumbernya dari impor.		
2.	Prasarana Pertanian	a. Penentuan kebutuhan prasarana pertanian.	a. Penataan prasarana pertanian.	a. Pengembangan prasarana pertanian.

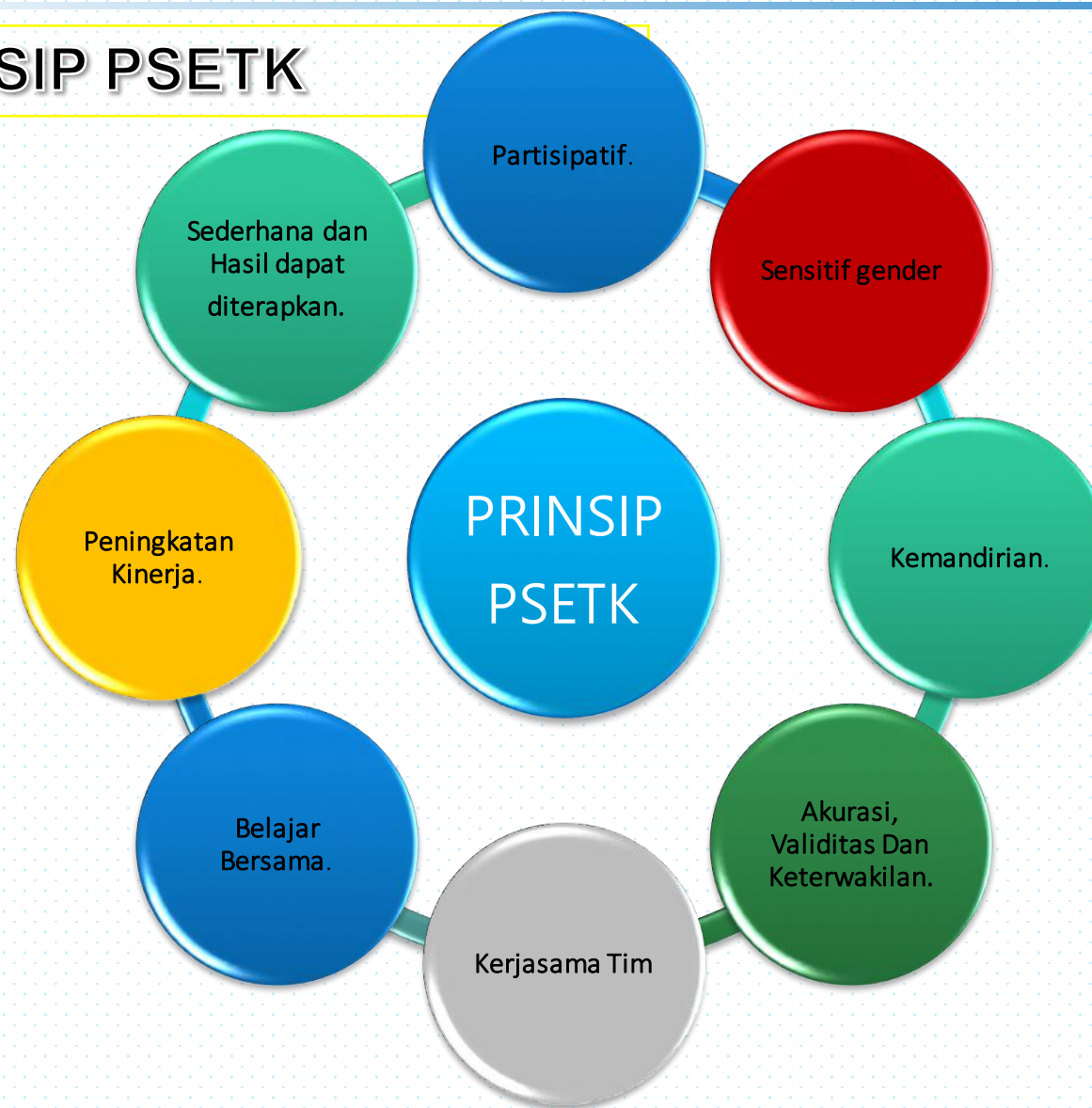
NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.



PANDUAN PSETK



PRINSIP PRINSIP PSETK





PELAKSANA PSETK

BBWS

Bappeda

Dinas Pertanian

Dinas PU

PETUGAS PENYULUH
PERTANIAN (PPL), KPL,
P3A/GP3A/IP3A ,DAN
POKTAN/GAPOKTAN, DAN
TPM

Daerah irigasi diatas 3000

Bappeda

Dinas Pertanian

Dinas PU

PETUGAS PENYULUH
PERTANIAN (PPL), KPL,
P3A/GP3A/IP3A ,DAN
POKTAN/GAPOKTAN, DAN
TPM

Daerah irigasi 1000-3000

Bappeda

Dinas Pertanian

Dinas PU

PETUGAS PENYULUH
PERTANIAN (PPL), KPL,
P3A/GP3A/IP3A ,DAN
POKTAN/GAPOKTAN, DAN
TPM

Daerah irigasi dibawah 1000



TAHAPAN PELAKSANAAN PSETK

TAHAPAN PERSIAPAN

SOSIALISASI PEDOMAN PSETK

Tujuan diselenggarakannya sosialisasi Pedoman PSETK adalah sebagai berikut :

- a) Menyebarluaskan pengertian PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSI
- b) Menyamakan persepsi tentang PSETK kepada seluruh pemangku kepentingan terhadap PPSI

PELATIHAN PSETK

Tujuan diselenggarakannya pelatihan PSETK adalah dalam rangka peningkatan kemampuan para peserta pelatihan dalam penyusunan PSETK yang handal dan professional.

Tujuan :

- a) Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penerapan pendekatan partisipatif.
- b) Peningkatan kemampuan peserta pelatihan dalam pemahaman dan pengembangan kemampuan penyusunan PSETK dengan metode pendekatan partisipatif potensi berdasarkan potensi sumber daya lokal yang tersedia pada suatu daerah irigasi

PERTEMUAN AWAL

Agenda Rapat : Sosialisasi penyusunan PSETK dan Pembentukan TIM penyusun dan fasilitator PSETK
Pada tahap ini pengelola menyiapkan diantaranya:

- Kerangka acuan kerja
- Daftar peserta/undangan
- Daftar Hadir
- Jadwal dan agenda pertemuan
- Materi yang diperlukan untuk kegiatan PSETK



TAHAPAN PERSIAPAN

SK TIM PENYUSUN

- SK Tim Penyusun Dikeluarkan oleh :
- DI Kewenangan Pusat Oleh Kepala BBWS
 - DI Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi
 - DI Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten

RAPAT PERTEMUAN DITINGKAT DI.

Pelaksana Kegiatan: TIM Penyusun PSETK
Lokasi Kegiatan Ditingkat Daerah Irigasi
Pertemuan koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait untuk membahas mekanisme kegiatan PSETK



TAHAPAN PELAKSANAAN

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN

Agenda Pertemuan adalah

- Pemahaman dan cara pengisian form isian PSETK
- Pemahaman teknik pengumpulan data
- Penyusunan Jadwal Pelaksanaan,
- Pembagian TIM (apabila Daerah Irigasinya Luas)
- Analisis kebutuhan Pelaksanaan.

PENELUSURAN JARINGAN

Pada Tahapan Ini dilakukan :

- Pengumpulan data sekunder. Kegiatan ini merupakan tugas dari tim penyusun
- penelusuran jaringan dan pengisian data Primer sesuai Form yang disediakan dalam panduan. Kegiatan ini merupakan tugas dan tanggung jawab tim fasilitator

FGD

Tujuan FGD untuk memperdalam dan mengidentifikasi masalah-masalah di DI dan sekitarnya, tersusunnya gagasan penanganan masalah, tersusunnya skala prioritas penanganan masalah (seperti perbaikan jaringan irigasi pada area dan lokasi sepanjang jaringan mana yang menjadi Prioritas, revitalisasi pembentukan P3A/GP3A dsb) menurut kelompok dan anggota masyarakat.



TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN

ANALISIS DAN VERIFIKASI DATA LAPANGAN

Tujuan verifikasi adalah untuk menelaah secara mendalam validitas data lapangan yang dilakukan oleh tim penyusun, apabila dirasa kurang maka dilakukan kembali pengumpulan data yang validitasnya dapat diakui

KONSOLIDASI HASIL PSETK

Setelah dianalisis dan diverifikasi maka dilakukan konsolidasi kan hasil dari masing masing tim untuk disusun menjadi dokumen PSETK

PENYUSUNAN LAPORAN

Tim penyusun membuat draft dokumen psetk hasil konsolidasi data PSETK



TAHAPAN AKHIR

LEGALISASI

Legalisasi yang dimaksud adalah dengan ditandatangani dokumen tersebut Oleh masing masing kewenangan :

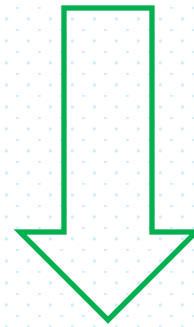
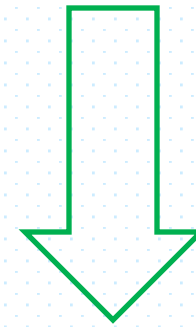
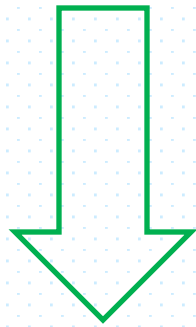
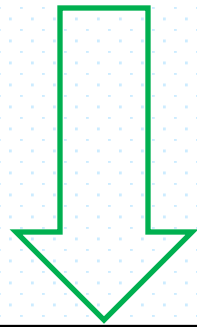
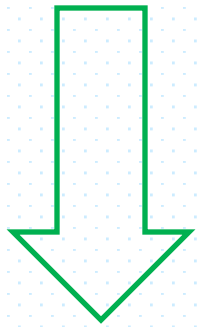
- Kewenangan Pusat oleh Kepala BBWS
- Kewenangan Provinsi oleh Kepala Bappeda Provinsi
- Kewenangan Kabupaten oleh Kepala Bappeda Kabupaten

PENYAMPAIAN LAPORAN

disampaikan pada Ditjen Bina Bangda,
Bappeda Prov/Kab, Dinas PU SDA
Prov/Kab, Dinas pertanian Prov/Kab dan
P3A/GP3A/IP3A atau Poktan/Gapoktan
sesuai kewenangan



Waktu pembaharuan PSETK dilakukan minimal 2 (dua) tahun setelah ditetapkan



ketersediaan data harus sepanjang waktu dengan tingkat validitas tinggi,

data dan informasi di tingkat Daerah Irigasi-pertanian yang ada bersifat dinamis

pembaharuan data dan informasi yang up to date sesuai dengan perjalanan waktu

sebagai evaluasi untuk validitas data dan informasi terdahulu, dan

Penambahan dan penyesuaian indikator yang terdapat pada formulir isian PSETK berdasarkan hasil evaluasi



KERANGKA LAPORAN PSETK

I. Bagian Muka

COVER LAPORAN

CHECKLIST LAPORAN (contoh terlampir)

BERITA ACARA (contoh terlampir)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

II. Bagian Isi/Subtansi

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan PSETK

1.3. Keluaran Yang Diharapkan

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH IRIGASI

BAB III. ANALISA DAN HASIL PSETK

BAB IV. MASALAH DAN REKOMENDASI

BAB V. PENUTUP

III. Bagian Lampiran Dan Kelengkapan Dokumen

LAMPIRAN



PENILAIAN PSETK

PEMBENTUKAN

Pembentukan Tim
Penyusun PSETK

1. Rapat persiapan
2. SK Tim
3. Komposisi Anggota

PELAPORAN

Penyusunan Laporan

Isi Laporan

1. Profil Kemampuan Sosial
Ekonomi
2. Profil kondisi Teknis
Keirigasian
3. Profil kondisi pertanian
4. Profil Kondisi Kelembagan
5. Identifikasi Potensi
Lingkungan
6. Identifikasi kebutuhan
pelatihan
7. Rekapitulasi masalah

PARTISIPATIF

Sosialisai

- a. Notulensi
- b. Daftar hadir

Peran serta P3A dalam
Penyusunan PSETK

Peran serta Perempuan



Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH